

ABSTRAK

Sistem penggajian merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, khususnya di sektor publik. Fokus penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris mengenai efektivitas sistem penggajian dalam mencegah terjadinya kecurangan (fraud) di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Provinsi Papua. Berdasarkan terbatasnya penelitian terdahulu yang mengkaji secara khusus sistem penggajian di institusi penegak hukum, penelitian ini menggunakan pendekatan fraud triangle untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peluang terjadinya fraud.

Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara kepada personel POLRI dari berbagai tingkatan kepangkatan. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif, dengan fokus utama pada aspek “opportunity” dalam fraud triangle dan pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penggajian POLRI Provinsi Papua telah terstruktur dan terkomputerisasi, namun masih terdapat kelemahan pada pengawasan internal dan pemisahan tugas yang dapat menciptakan peluang terjadinya kecurangan. Ditemukan praktik-praktik yang berpotensi fraud seperti penggajian fiktif dan manipulasi data kehadiran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat dan penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas sangat diperlukan untuk menutup celah terjadinya kecurangan dalam sistem penggajian sektor publik.

Kata Kunci: Sistem Penggajian, Fraud, Fraud Triangle, Pengendalian Internal, POLRI, Sektor Publik